



Analysis Of The Value Of Regional Revenue And Expenditure Budget (APBD) In The Bkad Of North Sumatera Utara

Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Bkad Provinsi Sumatera Utara

Farah Aliya ¹⁾; Puja Rizqy Ramadhan ²⁾; Anggi Pratama Nasution ³⁾

^{1,2,3)} **Universitas Pembangunan Panca Budi**

Email: ¹⁾farahaliya56@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Financial Performance, Value for Money, Effectiveness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Riset ini bermaksud untuk mengevaluasi performa finansial pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumatera Utara antara tahun 2020 hingga 2024 melalui kerangka kerja Value for Money. Peneliti menerapkan metodologi kuantitatif deskriptif dengan mengandalkan data primer serta sekunder yang bersumber dari studi pustaka dan dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Temuan studi mengindikasikan adanya variasi performa pada tiga pilar utama. Level efektivitas tergolong sangat memuaskan karena stabil di kategori "Efektif" dan "Sangat Efektif", bahkan menyentuh angka 276% di tahun 2022. Namun, rasio efisiensi memperlihatkan ketidakstabilan yang tajam, di mana sebagian besar periode berada pada tingkat "Tidak Efisien", kecuali anomali pada tahun 2022 sebesar 8928% yang dipicu oleh rendahnya penyerapan belanja. Di sisi lain, dimensi ekonomi terus membaik, bergerak dari level 102% ("Tidak Ekonomis") pada 2020 menuju kisaran 77-78% ("Ekonomis") pada periode 2023-2024. Secara umum, BKAD Provinsi Sumatera Utara mampu memaksimalkan penerimaan dan mengontrol beban belanja, kendati sinkronisasi efisiensi belanja terhadap pendapatan masih perlu ditingkatkan.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of North Sumatra from 2020 to 2024 using the Value for Money framework. The researcher applied a descriptive quantitative methodology, relying on primary and secondary data sourced from literature studies and Budget Realization Report (LRA) documentation. The study's findings indicate variations in performance across three main pillars. The effectiveness level is classified as highly satisfactory, remaining stable in the 'Effective' and 'Very Effective' categories, even reaching 276% in 2022. However, the efficiency ratio shows sharp instability, with most periods falling under the 'Inefficient' level, except for an anomaly in 2022 of 8928% triggered by low expenditure absorption. On the other hand, the economic dimension continues to improve, moving from a level of 102% ('Uneconomical') in 2020 to a range of 77-78% ('Economical') in the 2023-2024 period. In general, the BKAD of North Sumatra Province has been able to maximize revenue and control expenditure, although the synchronization of expenditure efficiency relative to income still needs to be improved.

PENDAHULUAN

Evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan dengan mengadopsi kerangka analisis *Value for Money* (VfM) dalam konteks manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mardiasmo (2018), terdapat tiga pilar fundamental dalam VfM—yakni aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas—yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan performa birokrasi. Dalam mengukur ketiga dimensi tersebut pada tata kelola keuangan publik, sangat penting untuk memahami kaitan antara tiga elemen operasional, yaitu *input*, *output*, serta *outcome*.

Sebagai representasi rencana keuangan tahunan, APBD disusun berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Instrumen ini tidak hanya digunakan untuk mengontrol alokasi anggaran, tetapi juga berfungsi menurut Widad (2022) sebagai basis evaluasi performa serta pendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. Provinsi Sumatera Utara sendiri mengoptimalkan beragam sektor unggulan untuk memacu PAD, mencakup bidang perdagangan, perhotelan, logistik, komunikasi, hingga manufaktur. Sejauh ini, pilar utama pendapatan daerah tersebut masih didominasi oleh perolehan pajak dan retribusi.

Pengelolaan APBD oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumatera Utara merupakan elemen strategis yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah sanggup mendanai proyek-proyek pembangunannya. Di bawah payung otonomi daerah, instansi pemerintah diwajibkan untuk beroperasi berdasarkan prinsip manajemen yang hemat dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah serta memberdayakan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat secara partisipatif.

Akan tetapi, dalam praktiknya, pengelolaan APBD kerap diwarnai oleh berbagai hambatan, seperti kurangnya kepatuhan manajerial yang mengakibatkan realisasi keuangan sering meleset dari perencanaan tahunan. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan alokasi dana secara hemat dan tepat guna. Selain itu, fokus penilaian anggaran selama ini dinilai terlalu sempit karena hanya menitikberatkan pada angka capaian, sementara aspek integritas proses penganggaran secara menyeluruh belum mendapat perhatian maksimal. Tabel di bawah ini merangkum Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kurun waktu 2020-2024:

Tabel 1 Rekapitulasi Target dan Capaian Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2020-2024)

Tahun	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	Pendapatan	Rp 8.012.109.886.748,00	Rp 7.705.249.024.215,99
	Belanja	Rp 5.834.682.516.247,28	Rp 5.972.771.569.928,00
2021	Pendapatan	Rp 7.802.901.013.566,00	Rp 8.099.422.537.756,57
	Belanja	Rp 2.659.960.360.858,00	Rp 2.626.732.767.777,00
2022	Pendapatan	Rp 200.000.000,00	Rp 552.444.480,00
	Belanja	Rp 61.335.437.182,00	Rp 49.320.470.275,00
2023	Pendapatan	Rp 6.536.576.897.320,00	Rp 5.923.054.972.731,95
	Belanja	Rp 143.786.861.351,00	Rp 110.978.832.199,00
2024	Pendapatan	Rp 6.757.000.462.161,00	Rp 6.393.011.733.922,95
	Belanja	Rp 3.238.981.930.327,00	Rp 2.538.344.913.979,00

Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara, Penulis (2026)

Sepanjang kurun waktu 2020 hingga 2024, capaian anggaran di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan dinamika yang cukup tajam. Tren pendapatan daerah tercatat gagal memenuhi ekspektasi pada tahun 2020 dan 2023, namun menunjukkan performa yang sangat impresif melampaui target pada periode 2021 dan 2022. Di sisi lain, aparatur daerah tampak disiplin dalam mengontrol pengeluaran, di mana serapan belanja secara rutin dijaga agar tidak melampaui batas atas anggaran yang telah disepakati. Kendati demikian, muncul anomali berupa selisih nilai anggaran yang drastis pada tahun 2022. Hal ini memberi indikasi kuat adanya pergeseran strategi fiskal maupun perubahan pada format penyusunan laporan keuangan pada tahun tersebut.

Kesenjangan yang terjadi antara perencanaan anggaran dan hasil realisasinya setiap tahun menjadi poin krusial yang melatarbelakangi studi ini. Penelitian ini berupaya mengevaluasi penerapan prinsip *Value for Money* dalam manajemen APBD di BKAD Provinsi Sumatera Utara, khususnya untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, serta nilai ekonomi dalam tata kelola pendapatan dan pengeluaran daerah. Berangkat dari fenomena tersebut, penulis terdorong untuk menyusun laporan penelitian yang bertajuk "Analisis *Value For Money* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada BKAD Provinsi Sumatera Utara".

LANDASAN TEORI

Teori *Stewardship*

Sebagai alternatif atas teori keagenan yang berfokus pada pertentangan kepentingan antara agen dan prinsipal, muncul teori *stewardship* (Schillemans & Bjurstrøm, 2020). Arfiansyah (2021) menjelaskan bahwa dalam kerangka ini, pengelola organisasi memikul amanah untuk mengurus aset yang diberikan dan wajib melaporkan hasilnya kepada pemilik. Di sini, pihak manajemen memposisikan diri sebagai *steward* (wali), sementara pemilik organisasi bertindak sebagai prinsipal. Prinsip utama teori ini berpijak pada nilai integritas, kepercayaan, kejujuran, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas. Dalam studi ini, teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengukur integritas pengelola APBD dalam menjalankan fungsinya sebagai *steward* yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan aspek ekonomi demi kesejahteraan publik sebagai pemilik kedaulatan (prinsipal).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Hutabarat (2020), performa finansial didefinisikan sebagai pengkajian untuk mengukur tingkat kepatuhan sebuah lembaga terhadap regulasi dan tata cara keuangan secara presisi. Oleh karena itu, capaian keuangan tidak sekadar menjadi instrumen untuk meninjau hasil kerja di periode lampau, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penyempurnaan di masa depan. Dalam lingkup otoritas daerah, kinerja keuangan merefleksikan kapasitas pemerintah dalam



menggerakkan serta mendayagunakan potensi dana mandiri demi memenuhi keperluan operasional, penyediaan layanan publik, dan program pembangunan daerah tanpa mengandalkan bantuan pusat secara mutlak, namun tetap berpijak pada koridor hukum (Nasution, 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Implementasi otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan mandat bagi pemerintah daerah untuk menata urusan pemerintahan secara mandiri demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan daerah yang kompetitif. Dalam mencapai visi tersebut, APBD digunakan sebagai instrumen strategis untuk perencanaan keuangan tahunan yang berpedoman pada regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Arifin, 2019).

Value For Money

Prinsip *Value for Money* (VfM) digunakan untuk mengukur sejauh mana sektor publik mendayagunakan anggarannya secara optimal (Mas'udi, 2019). Melalui pendekatan ini, kualitas dari hasil yang diraih diukur berdasarkan pengorbanan biaya yang dikeluarkan, sehingga efektivitas dan efisiensi manajemen sumber daya dapat terlihat jelas. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution & Ramadhan (2019), VfM tercapai ketika sebuah lembaga mampu menekan biaya *input* serendah mungkin untuk menghasilkan *output* terbaik demi pencapaian visi organisasi. Selain berlandaskan pada tiga pilar utama—ekonomi, efisiensi, dan efektivitas—evaluasi kinerja ini juga harus mempertimbangkan pemerataan serta luasnya cakupan layanan kepada masyarakat (Nasri, 2018). Penilaian kinerja yang komprehensif tidak boleh hanya berfokus pada hasil saja, melainkan harus mengintegrasikan analisis *input*, *output*, dan *outcome* secara terpadu.

Pengukuran Efektivitas

Tabel 2 Rentang Nilai Tingkat Efektivitas Kinerja

Rentang Presentase Capaian	Kategori Efektivitas
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% hingga 100%	Efektif
80% sampai kurang dari 90%	Cukup Efektif
60% sampai kurang dari 80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Mardiasmo (2018)*

Pengukuran Efisiensi

Konsep efisiensi berfokus pada optimasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil, yang ditunjukkan melalui hubungan antara *input* dan *output*. Tingkat efisiensi dinilai tinggi apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan *input* yang digunakan. Menurut Nasution et al. (2018), efisiensi merupakan kemampuan lembaga pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk memperoleh hasil spesifik dengan masukan seminimal mungkin, sekaligus menunjukkan kemampuan penyelesaian tugas secara akurat. Definisi ini selaras dengan pandangan Handoko et al. (2019) yang menekankan efisiensi sebagai perbandingan antara hasil (*output*) dengan sumber daya (*input*), atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah.

Tabel 3 Rentang Tingkat Efisiensi Kinerja

Rentang Presentase Capaian	Kategori Efisiensi
Di atas 100%	Sangat Efisien
90% hingga 100%	Efisien
80% sampai kurang dari 90%	Cukup Efisien
60% sampai kurang dari 80%	Kurang Efisien
Di bawah 60%	Tidak Efisien

Sumber: *Mardiasmo (2018)*

Pengukuran Ekonomi

Fokus dari konsep ekonomi terletak pada seberapa efisien organisasi dalam mendapatkan input dengan kualitas yang sesuai kebutuhan, namun dengan biaya yang paling minim. Konsep ini menekankan pentingnya manajemen yang hati-hati terhadap anggaran publik untuk mencegah tindakan pemborosan sumber daya. Selain itu, ekonomi digambarkan sebagai proses akselerasi kapasitas produksi ekonomi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional (Nasution et al., 2020).

Tabel 4 Klasifikasi Tingkat Ekonomi Kinerja

Rentang Presentase Capaian	Kategori Ekonomi
Di atas 100%	Tidak Ekonomis
90% hingga 100%	Kurang Ekonomis
80% sampai kurang dari 90%	Cukup Ekonomis
60% sampai kurang dari 80%	Ekonomis
Di bawah 60%	Sangat Ekonomis

Sumber: Mardiasmo (2018)

METODE PENELITIAN

Riset ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan lokus studi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 61, Medan. Objek penelitian yang dijadikan populasi sekaligus sampel adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Provinsi Sumatera Utara rentang waktu 2020 hingga 2024. Dokumen LRA dipilih karena menyajikan data fundamental untuk mengevaluasi kinerja anggaran menggunakan kerangka *value for money*, yang meliputi dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jenis data yang diolah bersifat kuantitatif, dengan mengkombinasikan sumber data primer dan sekunder. Prosedur perolehan data ditempuh melalui metode dokumentasi dan kajian pustaka. Selanjutnya, tahapan analisis data mencakup pengumpulan, pengolahan, evaluasi *value for money*, hingga perumusan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Evaluasi performa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan *Value for Money* dijabarkan sebagai berikut:

Pengukuran Efektivitas

Tabel 5 Evaluasi Capaian Efektivitas Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara (2020-2024)

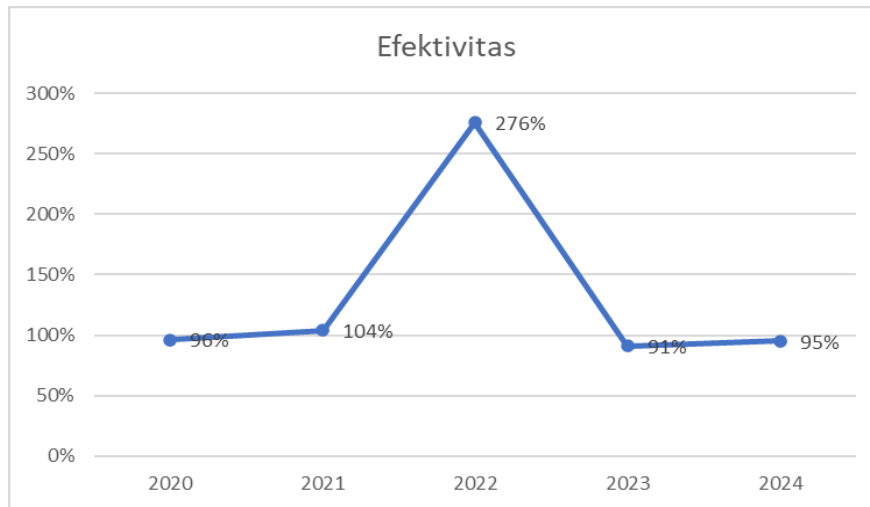
Periode (Tahun)	Target Pendapatan (Rp)	Perolehan Aktual (Rp)	Rasio (%)	Klasifikasi
2020	8.012.109.886.748	7.705.249.024.215	96%	Efektif
2021	7.802.901.013.566	8.099.422.537.756	104%	Sangat Efektif
2022	200.000.000	552.444.480	276%	Sangat Efektif
2023	6.536.576.897.320	5.923.054.972.731	91%	Efektif
2024	6.757.000.462.161	6.393.011.733.922	95%	Efektif

Sumber : Penulis (2026)

Analisis terhadap Tabel 5 mengungkapkan bahwa manajemen pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada level yang sangat memuaskan. Dalam lima tahun terakhir, efektivitas pengelolaan anggaran selalu berada di atas ambang batas "Efektif". Puncak capaian diraih pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 276% dari target, menjadikannya tahun dengan performa "Sangat Efektif" tertinggi. Stabilitas kinerja juga terlihat jelas pada tahun-tahun lainnya (2020, 2021, 2023, 2024) dengan persentase efektivitas berkisar antara 91% hingga 104%. Ini membuktikan bahwasanya pemerintah daerah memiliki kemampuan pengelolaan yang maksimal atas potensi penerimaan wilayah. Secara keseluruhan, konsistensi dalam mencapai atau melampaui target pendapatan ini mencerminkan tata kelola keuangan yang efektif. Visualisasi kinerja efektivitas BKAD Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 1 Kinerja Keuangan BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ditinjau dari Segi Efektivitas



Sumber : Penulis (2026)

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 1, dipaparkan kecenderungan tingkat efektivitas perolehan pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara rentang waktu 2020 hingga 2024. Data tersebut menunjukkan beberapa temuan penting: Kestabilan Positif: Pada kurun waktu 2020-2021, rasio efektivitas cenderung stabil, bergerak di kisaran 96% sampai 104%. Peningkatan Ekstrem: Terlihat lonjakan tajam pada tahun 2022, di mana angka efektivitas mencapai 276%, mengindikasikan bahwa perolehan pendapatan aktual jauh melebihi sasaran yang ditetapkan. Penyesuaian Kinerja: Pasca kenaikan drastis tersebut, grafik memperlihatkan normalisasi pada tahun 2023 (91%) dan 2024 (95%). Evaluasi Keseluruhan: Secara umum, tren grafik menegaskan bahwa performa keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara selalu melampaui batas minimal 90%. Berdasarkan standar riset ini, pencapaian tersebut tergolong dalam kategori kinerja "Efektif" hingga "Sangat Efektif".

Pengukuran Efisiensi

Tabel 6 Analisis Tingkat Efisiensi Pagu Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Utara (2020-2024)

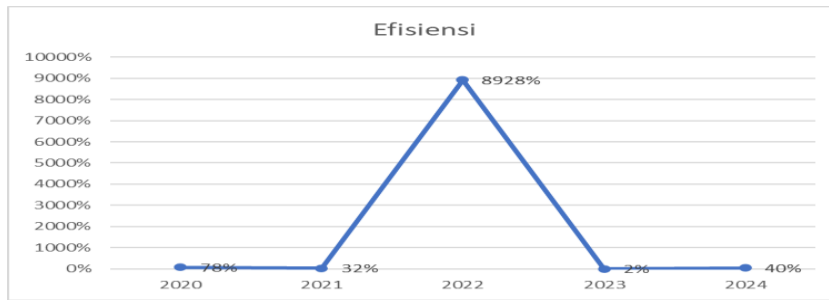
Tahun Periode	Perolehan Aktual (Rp)	Pengeluaran Aktual (Rp)	Rasio (%)	Klasifikasi
2020	7.705.249.024.215	5.972.771.569.928	78%	Kurang Efisien
2021	8.099.422.537.756	2.626.732.767.777	32%	Tidak Efisien
2022	552.444.480	49.320.470.275	8928%	Sangat Efisien
2023	5.923.054.972.731	110.978.832.199	2%	Tidak Efisien
2024	6.393.011.733.922	2.538.344.913.979	40%	Tidak Efisien

Sumber : Penulis (2026)

Merujuk pada data Tabel 6 tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan fluktuasi yang sangat ekstrem dalam periode amatan. Pada tahun 2020, kinerja keuangan tercatat "Kurang Efisien" dengan rasio sebesar 78%. Situasi menurun signifikan terjadi pada tahun 2021, 2023, dan 2024, di mana angka efisiensi merosot ke level 32%, 2%, dan 40%, sehingga seluruhnya diklasifikasikan sebagai "Tidak Efisien". Sebaliknya, tercatat kenaikan persentase yang tidak biasa pada tahun 2022 mencapai 8928%, yang dikategorikan "Sangat Efisien". Fenomena ini dipicu oleh besaran realisasi pengeluaran yang jauh lebih rendah daripada perolehan pendapatan pada tahun tersebut.

Secara keseluruhan, mayoritas tahun pengamatan menandakan performa pengelolaan belanja daerah yang belum efisien terhadap pendapatan yang terealisasi. Visualisasi kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Utara dari aspek efisiensi disajikan dalam grafik berikut:

Gambar 2 Kinerja Keuangan BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ditinjau dari Segi Efisiensi



Sumber : Penulis (2026)

Pengukuran Ekonomi

Tabel 7 Analisis Tingkat Ekonomis Belanja BPKAD Provinsi Sumatera Utara (2020-2024)

Periode (Tahun)	Target Belanja (Rp)	Pengeluaran Aktual (Rp)	Rasio (%)	Klasifikasi
2020	5.834.682.516.247	5.972.771.569.928	102%	Tidak Ekonomis
2021	2.659.960.360.858	2.626.732.767.777	99%	Kurang Ekonomis
2022	61.335.437.182	49.320.470.275	80%	Cukup Ekonomis
2023	143.786.861.351	110.978.832.199	77%	Ekonomis
2024	3.238.981.930.327	2.538.344.913.979	78%	Ekonomis

Sumber : Penulis (2026)

Merujuk pada data Tabel 7 rasio ekonomis atas realisasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, perolehan aktual melampaui plafon anggaran sebesar 102%, yang menempatkannya pada klasifikasi "Tidak Ekonomis". Akan tetapi, situasi membaik pada tahun 2021 dengan rasio 99%, sehingga masuk kategori "Kurang Ekonomis". Peningkatan performa berlanjut dari tahun 2022 hingga 2024, di mana pemda konsisten mampu menekan realisasi belanja di bawah pagu anggaran. Capaian pada tahun 2022 berada di angka 80% ("Cukup Ekonomis"), disusul tahun 2023 sebesar 77% ("Ekonomis"), dan tahun 2024 sebesar 78% ("Ekonomis"). Hal ini mengindikasikan adanya usaha konkret dalam efisiensi biaya, di mana pemerintah mampu mengoptimalkan serapan anggaran belanja sehingga hasilnya lebih hemat dibandingkan perencanaan awal. Grafik kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Utara dari aspek ekonomis disajikan berikut ini:

Gambar 3 Kinerja Keuangan BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ditinjau dari Segi Ekonomis



Sumber : Penulis (2026)

Visualisasi pada Gambar 3 menampilkan penurunan rasio belanja yang mencerminkan penguatan aspek ekonomis dari tahun ke tahun. Pola kurva grafik menunjukkan tren menurun yang konsisten, berawal dari puncak tertinggi di angka 102 pada tahun 2020 menuju titik terendah sebesar 77 pada tahun 2023. Penurunan garis ini mengindikasikan bahwa manajemen pengeluaran daerah menjadi lebih terkendali dan ekonomis. Pada akhir periode amatan (2023-2024), grafik menunjukkan stabilitas di kisaran angka 77-78, yang mempertegas keberhasilan BPKAD dalam mempertahankan performa belanja yang ekonomis selama dua tahun terakhir.



Pembahasan

Merujuk pada evaluasi realisasi APBD periode 2020-2024 menggunakan kerangka *Value for Money*, ditemukan dinamika performa finansial yang beragam pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Hasil peninjauan dari dimensi efektivitas, efisiensi, serta ekonomi dipaparkan sebagai berikut: Dimensi Efektivitas Pendapatan Secara menyeluruh, kemampuan instansi dalam merealisasikan target pendapatan berada pada level yang sangat memuaskan. Dalam kurun waktu lima tahun, derajat efektivitas secara berkelanjutan menempati klasifikasi "Efektif" dan "Sangat Efektif". Performa paling menonjol tercatat di tahun 2022 dengan angka capaian 276%, yang menandai efektivitas tertinggi sepanjang periode pengamatan. Adapun untuk tahun 2020, 2021, 2023, serta 2024, rasio tetap stabil di kisaran 91% sampai 104%. Data ini membuktikan kualitas manajemen anggaran yang prima serta kompetensi pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah sesuai proyeksi. Dimensi Efisiensi Belanja Berbeda dengan aspek efektivitas, rasio efisiensi justru memperlihatkan pergerakan yang sangat fluktuatif dan ekstrem. Pada tahun 2020, kinerja berada pada level "Kurang Efisien" (78%), yang kemudian merosot ke kategori "Tidak Efisien" pada tahun 2021 (32%), 2023 (2%), dan 2024 (40%). Anomali data muncul di tahun 2022 dengan lonjakan angka mencapai 8928% ("Sangat Efisien"), yang disebabkan oleh besarnya selisih antara pengeluaran yang sangat kecil dengan pendapatan yang tinggi pada tahun tersebut. Secara kumulatif, kebijakan belanja daerah terhadap total pendapatan masih perlu dievaluasi lebih dalam karena mayoritas periode penelitian belum menunjukkan tingkat efisiensi yang ideal. Dimensi Ekonomi Belanja Dari sudut pandang ekonomi, terlihat adanya progres perbaikan yang berkesinambungan setiap tahun. Walaupun pada tahun 2020 pengeluaran aktual melampaui plafon anggaran (102% - Tidak Ekonomis), namun pembenahan dilakukan secara bertahap. Hal ini terlihat dari perbaikan rasio di tahun 2021 (99% - Kurang Ekonomis), hingga konsistensi dalam meminimalkan belanja pada tahun 2022 (80% - Cukup Ekonomis), serta tahun 2023 dan 2024 yang masuk kategori "Ekonomis" (77% dan 78%). Tren penurunan persentase ini menunjukkan upaya nyata dalam penghematan biaya, di mana pemerintah daerah berhasil memaksimalkan anggaran secara lebih hemat dibandingkan estimasi awal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Capaian Efektivitas Pendapatan Prima: Pemrov Sumatera Utara berhasil mencapai tingkat optimasi yang sangat tinggi dalam merealisasikan target perolehan pendapatan. Konsistensi kinerja ditunjukkan dengan capaian pada level "Efektif" hingga "Sangat Efektif", di mana rekor tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 276%.
2. Ketidakstabilan Rasio Efisiensi: Terdapat fluktuasi yang ekstrem dalam manajemen efisiensi anggaran. Mayoritas periode pengamatan (2021, 2023, dan 2024) menunjukkan performa pada klasifikasi "Tidak Efisien". Anomali terjadi pada tahun 2022 dengan rasio fantastis 8928%, yang dipicu oleh ketimpangan masif akibat realisasi pengeluaran yang sangat minim berbanding lurus dengan lonjakan pendapatan yang diterima.
3. Progres Positif Tingkat Ekonomis: Manajemen pengeluaran belanja menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan. Setelah sempat berada pada posisi "Tidak Ekonomis" di tahun 2020, pemda berhasil melakukan pembenahan melalui efisiensi anggaran, hingga sukses mencapai kategori "Ekonomis" pada periode 2023-2024 dengan realisasi pengeluaran di bawah plafon yang ditetapkan (sekitar 77%-78%).

Saran

1. Sinkronisasi Perencanaan Pendapatan dan Pengeluaran: Diperlukan kajian komprehensif mengenai penyebab fluktuasi ekstrem pada tahun 2022. Pemda disarankan meningkatkan ketepatan proyeksi penerimaan untuk meminimalkan selisih antara target dan realisasi, sehingga tingkat efisiensi tetap terkendali dalam batas rasional.
2. Peningkatan Produktivitas Serapan Anggaran: Mengingat klasifikasi "Tidak Efisien" masih mendominasi rasio belanja terhadap pendapatan, pemda harus menjamin bahwa setiap penerimaan negara dapat dikonversi menjadi pengeluaran publik yang produktif dengan tetap mematuhi asas penghematan.
3. Konsistensi Kedisiplinan Fiskal (Prinsip Ekonomis): Tren positif pada aspek ekonomi selama periode 2022-2024 wajib dijaga. Disarankan untuk memperketat kontrol atas biaya operasional yang tidak berdampak langsung pada layanan publik guna memastikan efisiensi biaya tetap berada di bawah plafon anggaran.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Data: Menyikapi adanya lonjakan data yang anomali (misalnya angka 8928%), disarankan kepada instansi terkait untuk menyertakan narasi kualitatif atau catatan kaki penjelas dalam laporan keuangan guna mencegah salah tafsir oleh para pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin F (2021) Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 8(1), 50-56.
- Anwar A.P & Melawati. F. (2024) Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di desa cinengah kecamatan rongga kabupaten bandung barat. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 106-122.
- Astuti, C. M. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Rizkina, M., Nina, A., & Aliah, N. (2022). Efektivitas penerimaan retribusi IMB dan kontribusinya terhadap PAD. *Journal of Business and Economics*, 3(2).
- Rizkina, M., Aliah, N., & Dayu, W. (2024). Internship Programs at Bank Syariah Indonesia in Improving Competence Student Accountancy. *Accounting and Business Journal*, 6(2), 108-121.
- Rizkina, M., & Adiman, S. (2023). Value added tax (VAT) restitution and revenue. *Accounting and Business Journal*, 5(1), 27-40.
- Saputra, R., & Putri, D. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Lkpd Kabupaten Aceh Timur Khusus Pada Laporan Realisasi Anggaran). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 405-416.
- Sucipto, T. N. (2024, August). Relationship Between Competence and Independence Referring to Standards General, Field Work Standards, and Reporting Standards as Auditor's Professional Responsibilities. In *1St International Conference Epicentrum of Economic Global Framework* (Vol. 1, No. 1, pp. 674-681).
- Tobing.J. (2022) *Efektivitas Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Tola, D., & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa:(Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1-7.
- Pratiwi, E., Rizkina, M., & Rioni, Y. S. (2025). Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 4009-4015.